



Judul : BLT Migor dinilai bukan solusi efektif
Tanggal : Senin, 04 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

BLT Migor Dinilai Bukan Solusi Efektif

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai, kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng (Migor) bukanlah solusi yang efektif. Sebab, pemberian BLT merupakan kebijakan yang temporer dan terbatas.

Herman mengatakan, pemberian BLT belum menjadi solusi yang efektif dan komprehensif mengatasi kelangkaan dan mahalannya harga minyak goreng. Padahal, ia menambahkan, Indonesia sebagai negara produsen terbesar CPO (*crude palm oil*).

Herman menawarkan sejumlah solusi lain untuk mengatasi mahalannya harga minyak goreng di pasaran. Salah satunya adalah dengan menguasai hulu produksi sebesar 30-40 persen.

“Untuk komoditas pangan pokok/strategis yang sudah swasembada atau diproduksi lebih di dalam negeri, negara harus menguasai di hulu minimal 30-40 persen produksi, termasuk kebun kelapa sawit,” ujar politikus Partai Demokrat itu kepada *Republika*, Ahad (3/4).

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak juga mempertanyakan pemberian BLT yang menggunakan program reguler bantuan sosial Kemensos. “Kalau itu yang terjadi, maka tidak nyambung antara krisis migor dan solusi yang dilakukan pemerintah. Para pelaku usaha yang menjadi sumber penyebab krisis tetap tidak tersentuh,” kata dia.

Politikus PKS itu meminta Pemerintah menyelesaikan krisis Migor secara komprehensif dan sistemik. Pemerintah diharapkan memulai penyelesaian krisis migor dari sumber masalahnya.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk periode April, Mei, dan Juni. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait BLT minyak goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendukung penuh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menuntaskan dan mengungkap dugaan adanya kartel minyak goreng di Indonesia. Harapannya, pengungkapannya dapat tegas dan lebih cepat dilakukan.

“Kita mendorong KPPU lebih tegas dan cepat menjalankan fungsi-fungsinya terutama soal adanya kartel ini,” ujar Martin lewat keterangan tertulisnya, akhir pekan lalu.

Sebelumnya, KPPU menyebut, sinyal kartel yang awalnya diendus sejak awal tahun semakin kuat. Terutama pascabanjirnya pasokan minyak goreng kemasan setelah pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) awal bulan ini.

Atas bukti tambahan yang ditemukan KPPU, ia mendesak lembaga tersebut bergerak lebih cepat untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan. Jika bukti lengkap, bisa masuk dalam proses persidangan dan penuntutan. ■ ed ratna puspita